

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah

April 2026 2,37% (y-on-y)

Mei 2026 3.95% (y-on-y)

Juni 2026 4,55% (y-on-y)

- Perkembangan Inflasi Daerah Pada Triwulan II 2026, Pada April 2026, Riau tercatat mengalami inflasi dengan angka IHK sebesar 112,03 dari empat (4) Kab/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi, dengan angka IHK tertinggi terjadi di Kota Tembilahan (113,32), diikuti Kampar (112,57), Kota Dumai (112,18) dan Kota Pekanbaru sebesar (111,59). Secara kumulatif (Januari-April 2026), perkembangan inflasi tahun kalender Provinsi Riau berada pada level -0,15% (ytd), atau secara tahunan 2,37% (yoy). Dengan demikian, angka inflasi Riau berada di bawah target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Deflasi m-to-m tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 0,31% dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar -0,10%, Inflasi y-to-d tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 0,77% dan terendah terjadi di Kab. Kampar sebesar -0,64%, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 3,61% dan terendah terjadi Kabupaten Kampar sebesar 1,51%.

Secara kelompok komoditas utama penyebab Inflasi April 2026 yaitu Emas Perhiasan 0,92% Daging Ayam Ras 0,25% Ayam Hidup 0,17% Akademi Perguruan Tinggi 0,15% Angkutan Udara 0,11% Ikan Tongkol 0,10%.

Komoditas utama penyebab Deflasi April 2026 yaitu Cabai Merah -0,80% Bawang Putih -0,10% Kentang -0,05% Sabun Detergen Bubuk -0,04% Cabai Rawit -0,03% Kelapa -0,03%.

- Pada Mei 2026, Riau tercatat mengalami inflasi dengan angka IHK sebesar 112,88. dari empat (4) Kab/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi, dengan angka IHK tertinggi terjadi di Kab Kampar (114,01), diikuti Tembilahan (113,49), Kota Dumai (112,79) dan Kota Pekanbaru sebesar (112,22). Secara kumulatif (Januari-Mei 2026), perkembangan inflasi tahun kalender Provinsi Riau berada pada level 0,61% (ytd), atau secara tahunan 3,95% (yoy). Dengan demikian, angka inflasi Riau berada di atas target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi m-to-m tertinggi terjadi di Kab Kampar sebesar 1,28% dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar 0,15%, Inflasi y-to-d tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 0,92% dan terendah terjadi di Kota Dumai sebesar -0,49%, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 4,43% dan terendah terjadi Kabupaten Kampar sebesar 3,71%.

Secara kelompok komoditas utama penyebab Inflasi Mei 2026 yaitu Cabai Merah 0,29% Pemeliharaan/Service 0,11% Minyak Goreng 0,08% Tomat 0,07% Bensin 0,05% Ikan Patin 0,05%.

Komoditas utama penyebab Deflasi Mei 2026 yaitu Daging Ayam Ras -0,11% Emas Perhiasan

-0,10% Ayam Hidup -0,04% Jengkol -0,04% Telur Ayam Ras -0,01% Mobil -0,01%.

- Pada Juni 2026, Riau tercatat mengalami inflasi dengan angka IHK sebesar 113,28. dari empat (4) Kab/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi, dengan angka IHK tertinggi terjadi di Kab Kampar (114,22), diikuti Kota Dumai (113,33), Tembilahan (113,22) dan Kota Pekanbaru sebesar (112,77). Secara kumulatif (Januari-Juni 2026), perkembangan inflasi tahun kalender Provinsi Riau berada pada level 0,96% (ytd), atau secara tahunan 4,55% (yoy). Dengan demikian, angka inflasi Riau berada di atas target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi m-to-m tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 0,49% dan terendah terjadi di Kab. Kampar sebesar 0,18%, Inflasi y-to-d tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 1,08% dan terendah terjadi di Tembilahan sebesar 0,68%, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kab Kampar sebesar 4,90% dan terendah terjadi Kota Dumai sebesar 4,30%.

Secara kelompok komoditas utama penyebab Inflasi Juni 2026 yaitu Emas Perhiasan 0,79% Cabai Merah 0,57% Bensin 0,16% Akademi Perguruan Tinggi 0,15% Minyak Goreng 0,14% Pemeliharaan/Service 0,13%.

Komoditas utama penyebab Deflasi Juni 2026 yaitu Sabun Detergen Bubuk -0,04% Jengkol -0,03% Kentang -0,02% Masker -0,02% Buncis -0,01% Kelapa -0,01%.

2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok.

Berdasarkan hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok selama triwulan II Tahun 2026 (April - Juni 2026) ada beberapa komoditi yang mengalami fluktuasi harga. Berikut hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di Provinsi Riau

a. Beras Premium

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga beras premium tercatat sebesar Rp 16.000 per kilogram. Harga tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional sebesar Rp 15.400 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 600,26 per kilogram atau sebesar 3,90 persen di atas HET yang berlaku. Persentase deviasi tersebut menunjukkan bahwa harga beras premium telah melampaui batas kewajaran harga yang ditetapkan pemerintah dan termasuk dalam kategori waspada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara regulatif harga yang terjadi di pasar belum sepenuhnya terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas beras premium di Provinsi Riau Triwulan II 2026 berada pada status waspada karena rata-rata harga telah melampaui HET sebesar 3,90 persen, meskipun tingkat variasi harga antar wilayah tergolong rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa tekanan harga terjadi pada level umum, bukan akibat disparitas wilayah.

b. Beras Medium

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga beras medium tercatat sebesar Rp 13.774 per kilogram. Harga tersebut berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan

Pangan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp 14.000 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih di bawah HET sebesar Rp 226 per kilogram. Persentase deviasi tersebut menunjukkan bahwa harga beras medium dibawah batas harga yang ditetapkan pemerintah dan termasuk dalam kategori Aman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara regulatif harga yang terjadi di pasar cukup terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas beras medium tercatat sebesar 4,17 persen. Nilai tersebut menunjukkan tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong rendah, lebih tinggi dibandingkan beras premium. Hal ini berarti harga beras medium relatif seragam dan aman di seluruh wilayah pemantauan dan tidak menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah. Dengan demikian, perbedaan harga antar kabupaten/kota bukan merupakan faktor utama dalam pembentukan rata-rata harga.

c. Gula Pasir

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Juni 2026, rata-rata harga gula pasir tercatat sebesar Rp 18.909 per kilogram. Harga tersebut berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebesar Rp 17.500 – Rp 18.500 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih di bawah HAP sebesar Rp 1.409 per kilogram atau sebesar 8,05 persen di atas HET yang berlaku. Dengan demikian, harga gula pasir diatas HAP yang berlaku. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas gula pasir tercatat sebesar 3,27 persen. Angka ini menunjukkan tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang tergolong sangat rendah. Dengan demikian, harga gula pasir relatif seragam di seluruh wilayah pemantauan dan tidak terdapat disparitas harga yang signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah tidak menjadi faktor dominan dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas gula pasir di Provinsi Riau Triwulan II 2026 berada dalam kondisi relatif stabil. Harga gula pasir sedikit diatas ketentuan HAP, tingkat variasi harga antar wilayah sangat rendah dan masih dalam batas kewajaran pengendalian harga. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga gula pasir di Provinsi Riau secara umum masih terjaga.

d. Minyak Goreng Curah

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga minyak goreng curah tercatat sebesar Rp 19.664 per liter. Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) secara langsung sebagaimana Minyakita yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, tidak terdapat perhitungan selisih terhadap HET atau HAP. Dengan demikian, evaluasi terhadap komoditas ini lebih difokuskan pada tingkat variasi harga dan stabilitas antar wilayah. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas minyak goreng curah tercatat sebesar 8,80 persen. Angka ini menunjukkan tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang sangat rendah. Dengan demikian, harga minyak goreng curah relatif seragam di seluruh wilayah pemantauan dan tidak menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah. Perbedaan harga antar wilayah tidak menjadi faktor utama dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini.

e. MINYAKITA

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Juni 2026 , rata-rata harga Minyakita tercatat sebesar Rp 15.700 per liter. Harga tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp 15.700 per liter. Dengan demikian. Persentase deviasi tersebut menunjukkan bahwa harga Minyakita berada di batas kewajaran harga yang ditetapkan pemerintah dan termasuk dalam kategori aman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya berada dalam koridor kebijakan harga yang telah ditentukan.

Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas Minyakita tercatat sebesar 0,30 persen. Angka ini menunjukkan tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang sangat rendah. Dengan demikian, harga Minyakita relatif seragam di seluruh wilayah pemantauan dan tidak terdapat disparitas harga yang signifikan antar daerah. Perbedaan harga antar wilayah bukan merupakan faktor dominan dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas Minyakita di Provinsi Riau Triwulan II 2026 berada pada kondisi aman dan tetap waspada karena rata-rata harga tidak melampaui HET, meskipun tingkat variasi harga antar wilayah tergolong sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga terjadi secara merata dan tidak disebabkan oleh ketimpangan distribusi antar wilayah. penyebab minyakita di jual di atas HET di tingkat pengecer di pasar rakyat sebagai berikut; Dengan adanya kebijakan 43 tahun 2025 yang menetapkan distribusi minyakita 35 % melalui BUMN bulog, RNI dan Id-food, Bulog konsisten menyalurkan minyakita di pasar rakyat terutama pasar pantauan, Adapun pasokan minyakita pada pengecer di pasar rakyat berasal dari bulog

f. Minyak Premium

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga minyak goreng premium tercatat sebesar Rp 28.781 per liter. Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) secara langsung sebagaimana minyak goreng merk Minyakita yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, tidak terdapat perhitungan selisih terhadap HET atau HAP. Dengan demikian, evaluasi terhadap komoditas ini lebih difokuskan pada tingkat variasi harga dan stabilitas antar wilayah. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas minyak goreng premium tercatat sebesar 5,34 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong rendah. Harga minyak goreng premium relatif seragam di seluruh wilayah pemantauan dan tidak menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah bukan merupakan faktor dominan dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas minyak goreng premium di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dari sisi disparitas wilayah, dengan tingkat variasi yang sangat rendah. Karena tidak terdapat ketentuan HET atau HAP yang menjadi acuan pembandingan langsung, maka stabilitas komoditas ini lebih dilihat dari keseragaman harga antar wilayah serta konsistensi rata-rata harga selama periode pemantauan.

g. Tepung Terigu

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga tepung terigu tercatat sebesar Rp 13.429 per kilogram.

Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) secara langsung sebagaimana komoditas tertentu yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, tidak terdapat perhitungan selisih terhadap HET atau HAP dalam evaluasi komoditas ini. Penilaian terhadap tepung terigu difokuskan pada tingkat variasi harga dan stabilitas antar wilayah. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas tepung terigu tercatat sebesar 6,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sangat tinggi. Harga tepung terigu tidak seragam di seluruh wilayah pemantauan dan menunjukkan adanya disparitas harga yang cukup signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah tidak menjadi faktor utama dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas tepung terigu di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dari sisi disparitas wilayah, dengan tingkat variasi yang sangat sangat. Karena tidak terdapat ketentuan HET atau HAP sebagai acuan pembanding langsung, maka stabilitas komoditas ini dinilai berdasarkan keseragaman harga antar wilayah serta konsistensi rata-rata harga di provinsi Riau.

h. Cabai Merah

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga cabai merah tercatat sebesar Rp. 46.300,- per kilogram. Harga tersebut berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebesar Rp. 37.000 s/d Rp. 55.000 per kilogram. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas cabai merah tercatat sebesar 11,68 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga yang tinggi pada Triwulan II 2026. harga cabai merah tidak sepenuhnya seragam dan menunjukkan dinamika harga yang lebih fluktuatif dibandingkan komoditas pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng.

i. Cabai Rawit Hijau

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau bula Juni 2026, rata-rata harga cabai rawit tercatat sebesar Rp 41.437 per kilogram. Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagaimana komoditas tertentu yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan bapanas Oleh karena itu, tidak dilakukan perhitungan selisih terhadap HET atau HAP dalam evaluasi komoditas ini, dan penilaian stabilitas harga difokuskan pada tingkat variasi harga antar wilayah.

Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas cabai rawit tercatat sebesar 17,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas harga yang cukup signifikan antar wilayah pemantauan, sehingga harga cabai rawit tidak stabil dan menunjukkan tingkat fluktuasi yang lebih besar dibandingkan sebagian besar komoditas kebutuhan pokok lainnya.

j. Bawang Merah

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga Bawang Merah tercatat sebesar Rp. 40.337,- per kilogram.

Harga tersebut berada dibatas Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebesar Rp. 36.500 s/d Rp. 41.500 per kilogram, Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas bawang merah tercatat sebesar 10,40 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sedang. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan harga yang cukup terlihat antar wilayah pemantauan, meskipun belum masuk dalam kategori disparitas tinggi. Harga bawang merah tidak sepenuhnya stabil dan menunjukkan dinamika harga yang relatif lebih fluktuatif dibandingkan komoditas pokok dengan KV rendah.

k. Bawang Putih

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga bawang putih tercatat sebesar Rp 35.511 per kilogram. Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagaimana komoditas tertentu yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, tidak dilakukan perhitungan selisih terhadap HET atau HAP dalam evaluasi komoditas ini, dan penilaian stabilitas harga difokuskan pada tingkat variasi harga antar wilayah. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas bawang putih tercatat sebesar 7,71 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sedang. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan harga antar wilayah pemantauan yang cukup terlihat, meskipun belum masuk dalam kategori disparitas tinggi. Harga bawang putih tidak sepenuhnya seragam, namun tingkat variasinya masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas bawang putih di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan tingkat variasi harga antar wilayah pada kategori sedang. Meskipun tidak memiliki acuan HET atau HAP sebagai pembanding langsung, nilai KV yang berada di atas 5 persen menunjukkan adanya dinamika harga antar daerah yang perlu terus dipantau guna menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pasokan di seluruh wilayah.

l. Daging Ayam

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga daging ayam ras tercatat sebesar Rp 35.268 per kilogram. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, Harga Acuan yang ditetapkan sebesar Rp. 36.750/Kg. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas daging ayam ras tercatat sebesar 11,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa harga daging ayam ras relatif beragam di seluruh wilayah pemantauan dan terdapat disparitas harga yang signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah bukan merupakan faktor dominan dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas daging ayam ras di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan kondisi harga yang relatif agak tinggi diatas HAP yang telah ditetapkan, dengan tingkat variasi yang cukup tinggi.

Analisa : kenaikan harga daging ayam ras di Provinsi Riau

1. Pakan ternak umumnya merupakan komponen biaya terbesar dalam produksi ayam ras (mencapai 60-70%). Jika harga pakan meningkat akibat kenaikan harga jagung, bungkil kedelai, dan faktor input lain maka biaya produksi peternak naik. Peternak cenderung

- menaikkan harga jual ayam hidup untuk menutupi biaya produksi;
2. Naiknya kebutuhan konsumsi daging ayam dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan meningkat karena Pertumbuhan konsumsi MBG untuk Sekolah Rakyat yang terafiliasi dengan Program Pemerintah;
 3. Produksi ayam pedaging di Provinsi Riau ada dari Pelaku Usaha Plasma dan ada yang mandiri dari masyarakat setempat.

m. Telur Ayam

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp 28.781 per kilogram. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, Harga Acuan yang ditetapkan sebesar Rp. 27.000/Kg. Harga Telur Ayam Ras (Broiler) pada Triwulan II 2026 cenderung stabil. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas telur ayam ras tercatat sebesar 5,34 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa harga telur ayam ras relatif seragam di seluruh wilayah pemantauan dan tidak menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah tidak menjadi faktor utama dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas telur ayam ras di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dari sisi disparitas wilayah, dengan tingkat variasi yang rendah. Analisa : kenaikan harga telur ayam ras di Provinsi Riau

1. Pakan ternak umumnya merupakan komponen biaya terbesar dalam produksi telur ayam ras (mencapai 60–70%). Jika harga pakan meningkat akibat kenaikan harga jagung, bungkil kedelai, dan faktor input lain maka biaya produksi peternak naik. Peternak cenderung menaikkan harga jual telur ayam untuk menutupi biaya produksi;
2. Naiknya kebutuhan konsumsi telur ayam dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan meningkat karena Pertumbuhan konsumsi MBG untuk Sekolah Rakyat yang terafiliasi dengan Program Pemerintah.

n. Daging Sapi

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga daging sapi tercatat sebesar Rp 148.959 per kilogram. Komoditas ini yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp.140.000 per kilogram. Harga diatas HET. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas daging sapi tercatat sebesar 6,97 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa harga daging sapi relatif sangat bervariasi di seluruh wilayah dan disparitas harga yang signifikan antar daerah. Variasi harga antar wilayah bukan merupakan faktor dominan dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas daging sapi di Provinsi Riau Triwulan II 2026, untuk harga menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dari sisi disparitas wilayah, dengan tingkat variasi yang sangat tinggi. Tidak keseragaman harga antar wilayah mencerminkan bahwa distribusi dan pembentukan harga komoditas ini relatif tidak merata di seluruh daerah pemantauan.

o. Kedelai

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga kedelai tercatat sebesar Rp 12.561 per kilogram. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan seperti tahu, tempe, susu dan kecap. Satuan yang digunakan Rp/Kg. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Nomor 17 Tahun 2022, Harga Eceran Tertinggi Kedelai Impor Rp. 12.000/kg. Persentase deviasi tersebut menunjukkan bahwa harga kedelai berada di atas harga acuan pemerintah dan termasuk dalam kategori waspada karena telah melampaui batas acuan yang ditetapkan. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas kedelai tercatat sebesar 9,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sangat tinggi. Dengan demikian, harga kedelai relatif beragam di seluruh wilayah pemantauan disparitas harga yang signifikan antar daerah. Perbedaan harga antar wilayah bukan merupakan faktor utama dalam pembentukan rata-rata harga komoditas ini. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas kedelai di Provinsi Riau Triwulan II 2026 berada pada kondisi waspada karena rata-rata harga telah melampaui HAP sebesar 5,08 persen, meskipun tingkat variasi harga antar wilayah tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga terjadi secara merata di seluruh wilayah pemantauan dan bukan disebabkan oleh ketimpangan distribusi antar daerah.

p. Ikan Segar

Berdasarkan hasil pengolahan data pemantauan harga kebutuhan pokok Provinsi Riau Triwulan II 2026, rata-rata harga ikan segar tercatat sebesar Rp 38.726 per kilogram. Komoditas ini tidak termasuk dalam kategori yang memiliki penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagaimana komoditas tertentu yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, tidak dilakukan perhitungan selisih terhadap HET atau HAP dalam evaluasi komoditas ini, dan penilaian stabilitas harga difokuskan pada tingkat variasi harga antar wilayah. Nilai Koefisien Variasi (KV) komoditas ikan segar tercatat sebesar 11,01 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat variasi harga antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong sedang. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan harga antar wilayah pemantauan yang cukup terlihat, meskipun belum masuk dalam kategori disparitas tinggi. Harga ikan segar tidak sepenuhnya seragam dan menunjukkan dinamika harga yang lebih fluktuatif dibandingkan komoditas dengan KV rendah. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas ikan segar di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan tingkat variasi harga antar wilayah pada kategori sedang. Meskipun tidak memiliki acuan HET atau HAP sebagai pembanding langsung, nilai KV yang berada di atas 5 persen mencerminkan adanya perbedaan harga antar daerah yang perlu terus dipantau guna menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pasokan di seluruh wilayah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Triwulan II 2026 kondisi rata-rata harga beras premium di provinsi riau masih melampaui HET dikarenakan beberapa alasan: Jenis dan merk komoditi beras yang dikonsumsi masyarakat berbeda di setiap kab/kota se-provinsi riau, Pengawasan HET beras premium tidak melakukan atau belum optimal di kab/kota, Pengaruh krisis ekonomi global yang mempengaruhi harga plastik naik sangat signifikan;
2. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas minyak goreng curah di Provinsi Riau Triwulan II 2026 berada dalam kondisi tekanan harga yang tinggi.

Meskipun tingkat variasi harga antar wilayah tergolong sangat rendah, level harga secara umum telah berada jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah, sehingga memerlukan perhatian dalam pemantauan harga selanjutnya;

3. Penyebab minyakita di jual di atas HET di tingkat pengecer di pasar rakyat sebagai berikut; Dengan adanya kebijakan 43 tahun 2025 yang menetapkan distribusi minyakita 35 % melalui BUMN bulog, RNI dan Id-food, Bulog konsisten menyalurkan minyakita di pasar rakyat terutama pasar pantauan, Adapun pasokan minyakita pada pengecer di pasar rakyat berasal dari bulog;
4. Penyebab tepung terigu memiliki disparitas harga yang sangat tinggi antar wilayah kabupaten/Kota se Provinsi sebagai berikut, Belum seragamnya tingkat pemahaman kontributor kapupaten / kota dalam memahami juknis yang pemantauan harga Keputusan Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Nomor tahun 2026;
5. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, komoditas cabai merah di Provinsi Riau Triwulan II 2026 menunjukkan tingkat variasi harga antar wilayah dan antar waktu yang lebih besar dibandingkan sebagian besar komoditas lainnya. penyebab kenaikan harga cabe merah Di Provinsi Riau Sentra Cabe dari beberapa Provinsi penghasil cabe termasuk dari produksi lokal daerah kabupaten / kota. Harga bervariasi setiap kabupaten kota disebabkan asal cabe dan selera masyarakat setempat;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

1. Keterjangkauan Harga

- Konsisten mengadakan Operasi Pasar Murah melalui TOPLING (Toko Pangan Keliling) hingga Feburari 2026 yang telah dilaksanakan sebanyak 25 titik (a.l. Pekanbaru, Kab. Kampar & Kab. Siak);
- Bekerjasama dengan pedagang pasar dalam memasarkan cabai merah tersebut untuk menghindari gejolak akibat intervensi harga di pasar;
- Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Bapanas. Terlaksananya operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) diutamakan pada kecamatan Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga pangan;
- Pengembangan gerai/toko pangan murah di Provinsi Riau, yaitu Hortimart, Kedai Puantipa, dan Kios Puan Berseri yang dikelola oleh TPID Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru;
- Selain itu, BUMD Pangan Riau juga telah mengoperasikan 4 (empat) kios pengendali inflasi di pasar pantauan Kota Pekanbaru, 1 kios pengendali inflasi di Kota Dumai dan 1 kios pengendalian inflasi di Kabupaten Bengkalis;
- Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah oleh OPD, instansi vertikal, dan pelaku usaha, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS;
- Selain itu, kolaborasi pasar murah turut melibatkan perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR);
- Penguatan implemementasi program inovatif yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, yaitu Mobil Pak Aman (Mobil Pangan Keliling Andalan, Murah, dan Amanah) atau dikenal juga dengan Mobil Pak Iwan (Mobil Pasar Murah Tuntaskan

Inflasi dan Rawan Pangan) yang rutin melaksanakan pasar murah ke titik rawan pangan di Kota Pekanbaru;

- Pelaksanaan Pasar Tani dengan skema melibatkan petani untuk berjualan langsung di pasar, sehingga petani dapat menjual dengan harga di atas harga jual ke distributor atau pengepul, namun tetap lebih rendah dibandingkan harga pasar. Skema ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani di tengah deflasi komoditas hortikultura;
- Pelaksanaan sidak pasar ini ditujukan untuk memantau langsung kondisi harga dan pasokan kebutuhan pangan, serta melihat daya beli masyarakat pasca lebaran di Riau bersama Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur Riau, Ka KPw BI Riau dan Walikota Pekanbaru.

2. Ketersediaan Pasokan

Sebagai daerah yang defisit neraca pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga TPID Riau berkomitmen terus melakukan langkah sebagai berikut:

- Melakukan perluasan KAD yang dilakukan BUMD Pangan dengan petani Champion Cabai merah di Pulau Jawa pada Tahun 2026 sebanyak 21 MoU;
- Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan. Keikutsertaan Satgas pangan dalam Rapat Koordinasi TPID dan dalam kegiatan lainnya seperti sidak pasar;
- Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
- Melaksanakan rapat koordinasi TPID Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan koordinasi yang dilakukan TPID Prov. Riau, TPID Kota Pekanbaru, BUMD Pangan Riau, dan Koperasi Pangan Pekanbaru dalam upaya pemenuhan pasokan dan pengendalian harga komoditas pangan strategis. Dalam kegiatan ini juga membahas potensi perluasan operasional KAD komoditas pangan strategis ke daerah penghasil di luar Sumatera (a.l. Jateng dan Yogyakarta) sebagai bentuk mitigasi risiko keberlangsungan pasokan dari daerah produsen di Sumatera yang telah terlebih dahulu melaksanakan KAD. TPID se-Provinsi Riau bersama Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung peningkatan produktivitas pertanian Riau, terutama beras dan aneka cabai melalui penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani yang potensial di Riau.
- Meningkatkan kelompok pemanfaatan pekarangan;
- Penyusunan Database Ketersediaan Pangan;
- Monitoring harga dan pasokan dilaksanakan secara berkala maupun insidental oleh petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP). Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan harga pada saat penyelenggaraan Pasar Tani.
- Kegiatan ini disertai dengan pelatihan best practice budidaya bersama petani. Optimalisasi pemanfaatan program bantuan mobilisasi pangan yang disediakan oleh BAPANAS untuk mendukung GPM tahun dan Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Bank Indonesia.

3. Kelancaran Distribusi

- Dalam rangka menjamin kelancaran distribusi pasokan, TPID di Provinsi Riau berupaya memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi biaya distribusi, serta terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran jalur distribusi, terutama akses ke daerah rawan pangan, kepulauan, dan setiap momen peak season;

TPID se-Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan terus menjamin kelancaran distribusi pangan dan efisiensi rantai pasok, salah satunya melalui kebijakan di pelabuhan penyeberangan Riau untuk memprioritaskan kendaraan yang membawa komoditas pangan;

- Perluasan Fasilitas Distribusi Pangan oleh TPID Riau melalui BUMD Pangan Provinsi Riau guna memenuhi kebutuhan cabai merah yang diambil dari Kab. Sleman - Yogyakarta.

4. Komunikasi Efektif

Untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi TPID, serta menjalin komunikasi yang efektif baik internal TPID maupun dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Komunikasi Efektif dan Moral Suasion dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga, kesediaan stok pangan, antisipasi spekulasi harga, serta himbauan berlanja bijak kepada masyarakat;
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi rutin setiap minggunya bersama TPIP;
- Diversifikasi Pangan Lokal, Konsumsi beras per kapita menurun, konsumsi bahan pangan karbohidrat lainya meningkat;
- Meningkatkan jumlah kelompok yang mengembangkan olahan produk pangan lokal;
- Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Pola Pangan Harapan (PPH), pembinaan pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);
- Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis;
- Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis dan Pemantauan, pengadaaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website;
- Dalam rangka upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura khususnya Cabai telah diambil kebijakan :
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai seluas 100 hektar yang didanai melalui APBD dilaksanakan melalui penyaluran bantuan benih dan sarana produksi (saprodi) kepada kelompok tani di Kabupaten Kampar (seluas 20 Ha), Siak (20 Ha), Rokan Hulu (25 Ha), Indraggagiri Hilir (5 Ha), Rokan Hilir (10 Ha, Pelalawan (5 Ha), Kota Pekanbaru (5 Hagg) dan Kota Dumai (10 Ha). Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III;
- Kegiatan Edukasi Gerakan Tanam Cabai di Provinsi Riau dilaksanakan melalui penyaluran sebanyak 18.000 polybag benih cabai kepada kelompok wanita tani (KWT)/kelompok masyarakat di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, khususnya komoditas cabai. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III
- Melakukan pengawalan dan pendampingan dalam pengembangan kawasan cabai yang dilaksanakan pada setiap kesempatan kunjungan ke kelompok tani di kabupaten/kota, serta melalui komunikasi daring (online).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pengembangan kawasan cabai akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan produktivitas cabai dalam rangka pengendalian inflasi. Hal ini mengingat
-

Provinsi Riau saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 25-30% kebutuhan cabai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan kawasan cabai di Provinsi Riau.

- b. Melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2026, dialokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan cabai seluas 100 hektare serta pelaksanaan Edukasi Gerakan Tanam Cabai sebanyak 18.000 batang. Dengan dukungan tersebut, diperkirakan produksi cabai dapat meningkat hingga 610 ton, dengan asumsi produktivitas sebesar 6 ton per hektare.
- c. Sejauh ini, kebijakan yang dilaksanakan oleh Bidang Hortikultura memberikan dampak langsung terhadap kelompok tani penerima fasilitasi, baik melalui program pengembangan kawasan maupun Edukasi Gerakan Tanam Cabai (Gertam Cabai), serta masyarakat di sekitar kelompok tani tersebut. Namun demikian, karena keterbatasan alokasi anggaran, dampak yang dihasilkan belum signifikan terhadap pengendalian inflasi di tingkat Provinsi Riau;
- d. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan, Bersama mengawasi distributor penyuplai bahan pangan strategis dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis dan harga bahan pangan strategis serta membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- e. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Tersediaanya CPPD untuk menjaga ketersediaan beras jika terjadi fluktuasi harga beras, defisit pasokan beras, gagal panen, serta terjadinya bencana alam;
- f. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Tersediaanya database SKPG untuk mengetahui daerah yang mengalami rawan pangan dan aman pangan dalam hal ketersediaan pangan;
- g. Pola Pangan Harapan (PPH), tersampainya sosialisasi konsumsi bahan makanan dengan cara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat serta untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi masyarakat di Provinsi Riau;
- h. Prognosa Ketersediaan Pangan. Tersediaanya database prognosa ketersediaan pangan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan pangan strategis di bulan/tahun yang akan datang;
- i. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis. Tersediaanya informasi mengenai mengenai produksi, stok, dan harga pangan strategis;
- j. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website. Tersediaanya harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di 3 pasar utama;
- k. Penguatan kualitas statistik harga bahan makanan. Sinergi pencatatan harga antara Dinas Perindagkop, Dinas PTPH, Polda Riau, Bank Indonesia dan BPS Provinsi Riau untuk bersama mengawasi harga pangan strategis;
- l. Pengembangan kawasan cabai memang akan berpengaruh langsung terhadap produksi dan produktivitas cabai dalam rangka pengendalian inflasi, karena kita ketahui, Provinsi Riau hanya mampu menyediakan cabai merah sebanyak 25-30%, sehingga penting bagi Provinsi Riau menambah anggaran untuk pengembangan kawasan cabai.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Mengoptimalkan pengawasan HET untuk komoditi beras dan minyakita
- b. Menindaklanjuti kenaikan harga dan kelangkaan stok beberapa komoditi di Provinsi Riau dampak dari bencana alam di daerah pemasok, TPID Provinsi Riau akan melakukan perluasan KAD;
- c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan kontributor dan pelaporan ketersediaan.

Penertiban pemberlakuan kualitas mutu beras pada semua komoditi beras yang beredar

- d.
- e. Mendirikan Toko Pengendalian Inflasi Pangan di 4 Kab/Kota IHK Provinsi Riau;
- f. Anggaran untuk memfasilitasi pengembangan kawasan cabai di Provinsi Riau perlu ditingkatkan guna mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas cabai secara berkelanjutan.
- g. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada awal Triwulan II agar proses penanaman dapat berlangsung tepat waktu sesuai musim tanam, sehingga produksi dan produktivitas cabai dapat optimal serta mampu mendukung ketersediaan pasokan dalam rangka pengendalian inflasi.
- h. Perlunya suatu inovasi yang berbasis teknologi dan data (smart farming) sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan sumber daya, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan smart farming, diharapkan kegiatan budidaya dapat dilakukan secara lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga komoditas pertanian
- i. Anggaran untuk memfasilitasi kegiatan Pasar Tani di Provinsi Riau perlu dialokasikan, mengingat kegiatan ini sejalan dan saling melengkapi dengan Pasar Murah, serta memberikan wadah bagi petani untuk mempromosikan dan memasarkan produknya secara langsung.
- j. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada awal Triwulan II agar proses penanaman dapat berlangsung tepat waktu sesuai musim tanam, sehingga produksi dan produktivitas cabai dapat optimal serta mampu mendukung ketersediaan pasokan dalam rangka pengendalian inflasi.
- k. Perlunya suatu inovasi yang berbasis teknologi dan data (smart farming) sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan sumber daya, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan smart farming, diharapkan kegiatan budidaya dapat dilakukan secara lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga komoditas pertanian
- l. Anggaran untuk memfasilitasi kegiatan Pasar Tani di Provinsi Riau perlu dialokasikan, mengingat kegiatan ini sejalan dan saling melengkapi dengan Pasar Murah, serta memberikan wadah bagi petani untuk mempromosikan dan memasarkan produknya secara langsung.
- m. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada awal Triwulan II agar proses penanaman dapat berlangsung tepat waktu sesuai musim tanam, sehingga produksi dan produktivitas cabai dapat optimal serta mampu mendukung ketersediaan pasokan dalam rangka pengendalian inflasi.
- n. Perlunya suatu inovasi yang berbasis teknologi dan data (smart farming) sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan sumber daya, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan smart farming, diharapkan kegiatan budidaya dapat dilakukan secara lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga komoditas pertanian
- o. Anggaran untuk memfasilitasi kegiatan Pasar Tani di Provinsi Riau perlu dialokasikan, mengingat kegiatan ini sejalan dan saling melengkapi dengan Pasar Murah, serta memberikan wadah bagi petani untuk mempromosikan dan memasarkan produknya secara langsung
- p. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Diharapkan pada Bank Indonesia, BUMD Pangan Kota Pekanbaru, BUMD Pangan Provinsi Riau , Bulog dan ID Food ikut

berpartisipasi dalam penyediaan beraneka bahan pokok srategis dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM);

- q. Early Warning System (EWS) monitoring harga, pasokan, kondisi panen dan BMKG dari daerah sentra cabai di Indonesia oleh Kementerian Pertanian;
- r. Kerjasama antar daerah dan Kerjasama dengan petani Champion di wilayah sentra di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jawa.
- s. Bersama tim teknis kabupaten/kota mengawal distribusi saprodi sampai dengan pertanaman benih cabai sumber dana APBD Provinsi Riau.